YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Bidang Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau

KEVIN KAMARULLAH

NPM : 167110372

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini dengan judul **"Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru)"** penulis bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam penulisan proposal ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Meskipun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif,S.Ag.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku ketua prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA)
5. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia , M.Si selaku dosen pembimbing saya, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyelesaikan perkuliahan hari ini, mudah-mudahan ilmu yang Bapak dan Ibu berikan bermanfaat bagi semua orang dan penulis.

7. Terkhusus dan Istimewa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga Kepada kedua orang tua, kakak dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan selama penulis melaksanakan studi.
8. Penulis juga berterima kasih kepada sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu terutama semua yang ada didalam Grup "Diam-Diam" yang telah memberikan banyak motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna bagi penulis.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasanyang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini dengan baik. Semoga segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dinilai ibadah disisi Allah SWT. Penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021

Penulis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI ii
PENGESAHAN SKRIPSI iii
BERITA ACARA iv
SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
Lampiran Halaman Halaman xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH xvi
ABSTRAK xvii
ABSTRACT xviii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. .Latar Belakang 1
B. Fenomena Empiris 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
- Tujuan Penilitian 6
- Manfaat Penelitian 7

BAB II 8
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR 8
A. Studi Kepustakaan 8
1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik 8
2. Konsep Organisasi dan Organisasi public 13
3. Konsep Manajemen 16
4. Konsep Pelaksanaan 20
B. Kerangaka Pikir 26
D. Konsep Operasional 27
F. Teknik Pengukuran 31
BAB III 34
METODE PENELITIAN 34

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

A.Tipe Penelitian....34
B. Lokasi Penelitian....34
C. Populasi dan Sempel....35
D. Teknik Penarikan Sempel....36
E. Jenis dan Sumber Data....37
F. Teknik Pengumpulan Data....38
G. Teknik Analisis Data....38
H. Jadwal Kegiatan Penelitian....39
BAB IV....42
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN....42
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru....42
1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru....42
2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru....46
1. Pemerintah Kota Pekanbaru....49
B. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru....50
1. Sejarah Singkat....50
2. Visi dan Misi....53
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru....54
C. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru....63
BAB V....67
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....67
A. Identitas Responden....67
1. Identitas Respondend Berdasarkan Jenis Kelamin....67
2. Identitas Respondend Berdasarkan Usia....69
3. Identitas Respondend Berdasarkan Pendidikan....71
B. Hasil dan Pembahasan Dari Indikator Variabel Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis....73
1. Komunikasi....73
2. Resouces (Sumber Daya)....76
3. Disposisi....80
4. Struktur Birokrasi....83
C. Faktor-Faktor Penghambat Yang Dialami Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menjalankan Ketertiban Social penanganan Gelandang dan Pengemis di Kota Pekanbaru....87
BAB VI....90

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PENUTUP **90**
A. Kesimpulan 90
B. Saran 92
DOKUMENTASI **125**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel **halaman**

Tabel I.1 Jumlah Gelandang dan Pengemis 2

Tabel II.1 Operasional Variabel 29

Tabel III.1 Populasi dan Sampel Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 35

Tabel III.2 Jadwal waktu pelaksanaan penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 39

Tabel IV.1 Jumlah penduduk dan jenis kelamin berdasarkan Kecamatan di Kota Pekanbaru..... 47

Tabel IV.2 Jumlah penduduk menurut umur berdasarkan Kecamatan di Kota Pekanbaru 48

Tabel V.1 Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Staf Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang..... 68

Tabel V.2 Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Gelandang dan Pengemis..... 68

Tabel V.3 Identitas Responden Menurut Usia Staf Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang..... 70

Tabel V.4 Identitas Responden Menurut Usia Gelandang dan Pengemis 70

Tabel V.5 Identitas Respondend Menurut Jenjang Pendidikan Staf Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang..... 71

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.6 Identitas Respondend Menurut Jenjang Pendidikan Gelandang dan Pengemis..... 72

Tabel V.7 Tanggapan Responden Staf Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis 73

Tabel V.8 Tanggapan Responden Gelandang dan Pengemis Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis..... 74

Tabel V.9 Tanggapan Responden Staf Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis 77

Tabel V.10 Tanggapan Responden Gelandang dan Pengemis Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis..... 78

Tabel V.11 Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Staf Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang..... 81

Tabel V.12 Tanggapan Responden Gelandang dan Pengemis Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis..... 81

Tabel V.13 Tanggapan Responden Staf Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis 83

Tabel V.14 Tanggapan Responden Gelandang dan Pengemis Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis..... 84

Tabel V.15 Rekapitulasi Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru..... 86

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

Gambar II.1 Kerangka Pikir 26

Gambar IV.1 Struktur Organisasi di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. 66

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Daftar Kuesioner Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru..... 97
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Analasis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 115
3. Hasil Rekapituasi Daftar Telly Jawaban Responden Staf Pegawai Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang, dan Gelandang, Pengemis di Kota Pekanbaru..... 118
4. Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 3

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Kevin Kamarullah
NPM	: 167110372
Fakultas	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian	: **Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Agustus 2021

Pelaku Pernyataan

Kevin Kamarullah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANG DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Kevin Kamarullah

Kata Kunci: Analisis Pelaksanaan, Peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008, Penertiban Gelandang dan Pengemis, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Adapun indikator yang digunakan adalah Komunikasi, Resouces (Sumber Daya), Disposisi, Struktur Birokrasi. Tipe penelitian ini adalah Survei Deskriptif dengan Analisis Kuantitatif. Adapun dua kelompok yang menjadi Populasi dan Sampel yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan Gelandang dan Pengemis. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan melalui Kuesioner, Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penelitian ini berada pada kategori Cukup Baik. Adapun yang menjadi faktor penghambat Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam upaya menertibkan Gelandang dan Pengemis yaitu belum adanya peraturan yang tegas dari pemerintah kota pekanbaru, landasan hukum untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menangani Gelandang dan Pengemis belum kuat, sarana dan prasarana di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya masih sangat minim.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF PEKANBARU REGIONAL REGULATION NUMBER 12 YEAR 2008 CONCERNING SOCIAL ORDER IN HANDLING MIDDLE AND BEGGERS BY THE SOCIAL SERVICES AND CEMETERIES of PEKANBARU CITY

ABSTRACT

Kevin Kamarullah

Keywords: Implementation Analysis, Pekanbaru City Regional Regulation No. 12 of 2008, Controlling Midfielders and Beggars, Pekanbaru City Social and Cemetery Service.

This study aims to determine and analyze the implementation of Pekanbaru City Regional Regulation No. 12 of 2008 concerning Social Order in Handling Homeless and Beggars by the Pekanbaru City Social and Cemetery Service. The indicators used are Communication, Resources (Resources), Disposition, Bureaucratic Structure. This type of research is a descriptive survey with quantitative analysis. The two groups that became the population and samples were the Pekanbaru City Social and Cemetery Service and the Midfielders and Beggars. In this case the researcher collects data through Questionnaires, Interviews, Observations and Documentation. Based on the results of the research conducted on this study, it was in the Good Enough category. As for the inhibiting factors for the performance of the Pekanbaru City Social and Cemetery Service in an effort to curb vagrants and beggars, namely the absence of firm regulations from the Pekanbaru city government, the legal basis for the Pekanbaru City Social and Cemetery Service in dealing with homeless and beggars, facilities and infrastructure in Pekanbaru City. The Pekanbaru City Social and Cemetery Service in carrying out its duties is still very minimal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. .Latar Belakang

NKRI adalah Negara kesatuan yang berbentuk republic yang merdeka pada tahun 1945.yang memiliki beribu pulau dan berbagai macam budaya,bahasa.NKRI didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan semua masyarakat umum,mencerdaskan kehidupan bangsa,ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan social,hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinia keempat.Tujuan dibentuknya paling penting dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupannya secara wajar.Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keluluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilihat perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi,peran masyarakat,pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.Oleh karena itu,penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas,nyata dan bertanggung jawab secara professional.

Berdasarkan UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Fakir miskin dan anak- anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Negara Mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan penelitian dilapangan, penulis mendapatkan data jumlah Gelandangan dan Pengemis yang ditampung dan didata oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1

Jumlah Gelandang dan Pengemis Kota Pekanbaru tahun 2019-2020

No	Tahun	Jumlah Gelandang	Jumlah Pengemis
1	2019	18	40
2	2020	30	30

Sumber Olahan Penulis 2021.

Adapun factor penyebab yang membuat gelandang dan pengemis menjadi meningkat dari tahun ke tahun menurut Agustian, AP, M.Si selaku seksi rehabilitasi tuna social, korban tindak kekerasan dan perdagangan manusia yaitu:

a) Faktor Ekonomi

Kehidupan yang kurang layak dengan kondisi ekonomi yang kurang baik, mendorong “mereka”untuk memperbaiki/ memenuhi kebutuhan. Namun usia dan kondisi SDM yang tidak memadai, memaksa menempuh jalan paling mudah yaitu ke jalan.

b) Factor Rumah Tangga/ Keluarga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Masalah keluarga, seperti orang tua yang bercerai, atau kurangnya perhatian, menyebabkan anak-anak mencari pelarian dari masalahnya, sekaligus mencari kemudahan akses pemenuhan kebutuhan dasarnya.

c) Faktor Lingkungan

Sering kali PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) akan cenderung membentuk komunitas sesame mereka, sehingga perilaku yang lazim akan tertular sangat cepat terhadap anak-anak yang tumbuh dilingkungan tersebut.

d) Factor Perilaku Masyarakat

Bahwa sifat iba dan pengasih yang masih sangat melekat pada sebagian besar masyarakat yang akhirnya seperti "Pupuk"bagi masalah social di jalanan, dengan adanya masyarakat yang tetap memberi/ menyisikkan bantuan, menyebabkan gelandang dan pengemis memiliku "Source" untuk tetap ber eksistensi.

e) Faktor Regulasi Hukum

Regulasi hukum belum diterapkan secara maksimal. Bahwa selama ini aturan dan sanksi diterapkan belum berjalan secara maksimal. Padahal jika aturan dan sanksi berjalan secara maksimal akan menimbulkan efek jera sehingga tujuan untuk menderadasi PMKS, Gelandang dan Pengemis akan lebih mudah di realisasikan.

Hal ini sesuai dengan visi dan misi Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru disebutkan sebagai berikut:

- Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS/PSKS dilandasi kesetiakawanan social serta pemakaman yang indah dan tertib

Adapun misi dari Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Meningkatkan pelayanan kesejahteraan social bagi penyandang masalah kesejahteraan social.
- Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi social.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja.
- Mensosialisasikan bantuan kesejahteraan social.
- Mengembangkan/meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta memperdayakan potensi dan sumber kesejahteraan social (PSKS) secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan social.

Dalam mewujudkan visi dan misi dari Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru,maka seluruh anggota dalam dinas social dan pemakaman kota pekanbaru baik dari ketua,wakil,sekretaris,bendahara dan anggota bidang lainnya harus berkerja sama sesuai dengan tupoksinya masing-masing agar system dapat berjalan sesuai dengan semestinya.Dalam menjalankan visi dan misinya.

Peraturan Daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban social pada bab 2 ayat 1,2,dan 3 yang berbunyi:

1. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara ditempat umum
2. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap bela kasihan orang lain
3. Gelandangan pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dan dijelaskan juga pada Bab 3 tentang larangan pada pasal 3 ayat 1,2, dan 3 sebagai berikut:

1. Dilarang melakukan pengemisan didepan umum dan ditempat umum di jalan raya,jalur hijau,persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan
2. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya,jalur hijau,persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan atau di tempat-tempat umum
3. Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian ditempat umum dijalan raya,jalur hijau,persimpangan lampu merah dan jembatan penyebaran.

B. Fenomena Empiris

Dari penjelasan diatas ditemukan beberapa fenomena empiris yakni sebagai berikut:

a) Ditemukan masih adanya Pengemis yang meminta kepada masyarakat di persimpangan lampu merah.
b) Saat melakukan observasi peneliti menemukan sejumlah pengemis yang bermodus sebagai penjual Koran dan tisu.
c) Kurangnya pengawasan dari dinas social dan pemakaman kota pekanbaru terhadap pengemis dan gelandangan.
d) Masih belum adanya pembaharuan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial khususnya dalam penanganan gelandang dan pengemis di kota pekanbaru
e) Dan juga landasan hukum dalam peraturan nomor 12 tahun 2008 tersebut belum tegas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian lebih lanjut tentang **"Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru"**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas dan untuk mempermudah pemahaman permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka rumusan masalah yang di ajukan adalah sebagai berikut :

1) Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru ?
2) Apa saja yang menghalangi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas nya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- Tujuan Penilitian
    1) Untuk mengetahui apakah sudah terlaksana dengan baik Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
    2) Untuk mengetahui juga apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik, yaitu sebagai data sekunder (berupa data-data dan informasi) bagi peneliti lain yang kedepannya melakukan penelitian yang serupa.
2. Manfaat teoritis, yaitu dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Manfaat praktis, yaitu dapat digunakan bagi instansi-instansi terkait untuk merumuskan suatu kebijakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam memperjelas arah dan tujuan penelitian ini,maka kiranya perlu diberikan beberapa konsep teori dan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan yang dapat memberikan solusi yang erat kaitannya dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan,agar dapat memberikan pemecahan penelitian yang jelas dalam mengetahui dan membahasnya,terutama dalam menganalisa data,diantaranya:

1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Administrasi menurut Sondang P. Siagian adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi dalam arti sempit berkisar pada berbagai kegiatan ketataushaan. Kegiatan-kegiatan ketatausahaan merupakan bagian yang sangat penting dari kegiatan organisasi terutama karena kegiatan tersebut menyangkut penanganan informasi yang dikatakan berperan sebagai ”darah” bagi suatu organisasi. Dalam pengertian yang demikian administrasi biasanya hanya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan ktatausahaan yang mencakup korespondensi, kesekretariatan, penyusunan laporan dan kearsipan.(dalam Siagian,2001:267).

Administrasi dalam arti luas berarti keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasional tertentu oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian sutu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarna tertentu pula.(dalam Siagian,2001:267).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bahkan lebih lanjut dikatakan Herbert A. Simon menyebutkan bahwa administrasi sebagai perilaku kerja sama kelompok orang (dalam Syafri,2014:9).

Dwight Waldo menyebutkan administrasi sebagai :tindakan yang diperhitungkan dengan cermat untuk merealisasikan tujuan tertentu yang dikehendaki dengan kerugian/pengorbanan yang minimal untuk mewujudkan tujuan lain yang dikehendaki bahkan lebih lanjut dijelaskan orang mampu dan dapat memaksimalkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan dengaan jalan menghubungkan dengan cermat antara sarana atau usaha dan tujuan atau hasil'' (dalam Syafri 2014:10).

Dwight waldo (dalam syafri 2014:10) pun berpendapat terdapat 4 ide pokok yang dapat disimpulkan dari arti administrasi:

1. Administrasi adalah kegiatan.
2. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka kerja sama sekelompok orang.
3. Rangkaian kerja sama itu dilakukan secara efisien.
4. Rangkaian kegiatan kerja sama yang efisien itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Menurut Pfifner dan Presthus (dalam Wirman 2014:20) menyebutkan Administrasi publik sebagai upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik.

Sedangkan menurut Marshall Edward Dimock & Glady Ogden Dimock mengatakan administrasi publik adalah: Penyelenggaraan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara politis. Meskipub demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program-program secara teratur, elainkan juga berkenaan dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kebijakan umum (*policy*) karena didalam dunia modern, birokrasi merupakan pembuat kebijakan pokok dalam pemerintahan" (dalam Wirman, 2012:22).

Bapak Administrasi Publik Modern Woodrow Wilson mendefinisikan administrasi publik adalah: Urusan atau praktik urusan pemerintahan karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta (dalam Wirman, 2012:21).

R.C. Chandler dan J.C. Plano (dalam Indradi 2016:105) menyatakan bahwa administrasi publik adalah: Proses dimana sumber daya dan personel public diorganisir dan dikoordinasikanuntuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

a) Prinsip-Prinsip Administrasi

Prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai dalam referensi ilmu administrasi. Henry Fayol (dalam Zulkifli. 2005;71). mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu :

1. Pembagian kerja (*division of work*). Dimaksudkan untuk memusatkan kegiatan, pengkhususan orang didalam bidangnya (spesialisasi) agar memperoleh efisiensi yang tinggi.
2. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*). Wewenang merupakan hak administrator atau manajer untuk member perintah dan merupakan sesuatu yang melekat dalam jabatan administrator atau manajer. Konsekuensi dari pemilikan wewenang tersebut adalah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tanggungjawab, baik bagi yang member maupun menerima perintah. Keseimbangan antara wewenang yang didelegasikan dengan tanggungjawab perlu untuk dipertimbangkan.

3. Disiplin (*discipline*). Disiplin merupakan hal yang mutlak didalam kegiatan kerjasama, dalam hal mana anggota organisasi tunduk dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Disiplin mengikat semua tingkat kepemimpinan organisasi dan menuntut adanya sanksi.
4. Kesatuan perintah (*unity of command*). Pekerja (bawahan) menerima perintah hanya dari satu pemimpin (atasan).
5. Kesatuan arah atau tujuan (*unity of direction*). Bahwa kegiatan organisasi harus mempunyai tujuan yang sama dan langsung dari perencanaan yang dibuat oleh seorang manajer.
6. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum (organisasi) di atas kepentingan pribadi (*subordination of individual to general interest*). Dalam hal ini kepentingan organisasi sebagai kepentingan bersama harus didahulukan, bukan kepentingan pribadi.
7. Pengupahan atau penggajian (*renumeration*). Penggajian dan metode pembayarannya haru adil dan jujur sesuai dengan kompensasi pekerjaan dengan mengusahakan agar dapat memuaskan pimpinan dan bawahan.
8. Sentralisasi (*centralization*). Wewenang perlu didelegasikan kepada bawahan, tetapi tanggungjawab akhir tetap dipegang oleh pimpinan puncak (top manager). Masalahnya seberapa besar wewenang didelegasikan, disentralisasikan atau dipusatkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9. Skala hierarki (*scalar chain*). Skala hierarki merupakan garis wewenang dan program yang diturunkan dari pimpinan puncak ke pimpinan terbawah dan pekerja.
10. Tata tertib (*order*). Penempatan dan pendayagunaan sumber daya (orang-orang dan barang-barang) sesuai dengan tempatnya dalam suatu organsiasi.
11. Keadilan (*equity*). Kesetiaan dan pengabdian anggota harus diimbangi dengan sikap keadilan dan kebaikan serta perlakuan wajar dari manajer terhadapnya.
12. Stabilitas jabatan (*stability of tenure*). Memberikan waktu yang cukup sangat diperlukan pekerja untuk menjalankan fungsinya dengan efektif, sehingga perlu mengurangi intensitas pergantian jabatan atau personal.
13. Prakarsa atau inisiatif (*inisiative*). Dalam semua tingkatan organisasi semangat kerja didukung oleh berkembangnya prakarsa, dan karenanya kepada bawahan perlu diberikan kebebasasan untuk memikirkan dan mengeluarkan pendapat tentang semua aktivitas, bahkan melihat dan menilai kesalahan-kesalahan yang terjadi.

b) Unsur-Unsur Administrasi

konsep administrasi memiliki sejumlah unsur-unsur administrasi uantuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok yang bekerja sama memerlukan seperangkat instrument yang saling terikat dan bersinergi. instrumen tersebut dalam bentuk unsur yang mutlak harus ada. Artinya jika tidak adanya unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan atau yang di kehendaki tidak akan tercapai dengan apa yang telah dikehendaki bersama. Menurut Wirman (2012:11-13) adanya unsur-unsur administrasi adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Tata usaha
8. Hubungan Masyarakat

2. Konsep Organisasi dan Organisasi public

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakaan wadah(tempat) pengelompokan orang dan pembaagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses)bagi pencapaian tujuan.

H.B Siswanto (2013;73)organisasi didefenisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama.Dalam suatu organisasi mengandung 3 elemen,yaitu:

1. Sekelompok orang
2. Interaksi dan kerja sama,serta
3. Tujuan bersama.

Richard Scott(dalam Miftah Thoha 2011;35)organisasi adalah sebagai kesatuan rasional dalam upaya untuk mengejar tujuan, sebagai kualisi pendukung yng kuat dimana organisasi merpakan instrumen untuk mengejar kepentingan masing-masing, sebagai suatu sistim terbuka dimana kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

imput dari lingkungan,sebagai alat dominasi dan banyak lagi perspektif yang dapat dipakai untuk memaknai organisasi.

James D.Mooney mengatakan organisasi yaitu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama .Organisasi menurut Chaster I.Barnad adalah suatu sistem kegiatan yang diarah kan pada tujuan yang hendak dicapai,fungsi utama manajemen yaitu perumusan tujuan pengadaan sumber daya yang di perlukan untuk mencapai tujuan (dalam Zulkifli &Nurmasari 2015;41).

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
Siagian(dalam Yussa & Hendry Andry 2015;14)

Menurut John D .millet (Inu Kenana 2003;113) Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselengarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Menurut Siagian (dalam Yussa & Hendry Andry 2015;14) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua oarang atau lebih yang berkerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebuut bawahan.

Dwight aldo (Inu Kenana 2003;114)mendefenisikan organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan –kewenangan dan kombinasi –kombinasi dalam hubungan antar orang – orang pada sistem administrasi.

Sebagai suatu proses, organiasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan , pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu ,pendelegasian wewenang ,pengawasan dan diakhiri dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengevaluasian pelaksanaan tugas.Defenisi organisasi menurut pendekatan proses pendapat massie (dalam Zulkifli & Moris A Yogia 2014;20)yaitu organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok orang yang membagi tugas –tugas nya diantara para anggota ,menetapkan hubungan – hubungan kerja dan menyatukan aktifitas –aktifitas nya kearah pencapaian tujuan bersama.

Menurut Siagian (2007;141)dalam suatu negara administrasi ,pemerintah dengan seluruh jajarannya bisa dikenal sebagai abdi masyarakat,dalam bahasa yang sederhana peran tersebut dapat diharapkan terwujud dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang di perlukan oleh seluruh warga masyarakat.

Organisasi adalah suatu sistim perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang berrkerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Hasibuan 2002;5).

Richard Scott(dalam Miftah Thoha 2011;35)organisasi adalah sebagai kesatuan rasional dalam upaya untuk mengejar tujuan, sebagai kualisi pendukung yng kuat dimana organisasi merpakan instrumen untuk mengejar kepentingan masing-masing, sebagai suatu sistim terbuka dimana kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung imput dari lingkungan,sebagai alat dominasi dan banyak lagi perspektif yang dapat dipakai untuk memaknai organisasi.

Berdasarkan penentuan organisasi tersebut disimpulkan bahwa organisasi merupakan kesimpulan orang yg berkerja sama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam sistem koordinasi dan pengaturan guna mendahulukan pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian organisasi secara statis adalah wadah untuk berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama (Dalam Nawawi 2005:8).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Siagian (2003:6) juga mendefenisikan dan memaknai organisasi sebagai berikut : Sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/beberapa orang disebut atasan dan seorang/kelompok orang disebut bawahan.

Menurut Gareth R.Jones (dalam Maksudi 2017:39) memahami organisasi merupakan alat yang digunakan oleh orang-orang baik secara individual Maupu kelompok untuk mencapai bermacam tujuan.

Kast dan rosenzweigh (dalam maksudi 2017;39) menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu subsistem dari lingkungan yang lebih luas.

a. Unsur-Unsur Organisasi

Kast dan rosenzweigh (dalam maksudi 2017;39) mengatakan bahwa dalam organisasi terdapat unsur-unsur yang merupakan satu kesatuan yang utuh agar sebuah organiasi bias berjalan, adapun Unsur-unsur nya adalah:

1. *Goal-Oriented* yaitu mengarah kepada pencapaian tujuan.
2. *Technologica system* yaitu orang yang mengunakan pengetahuan dan teknik.
3. *Structural system* yaitu orang-orang bekerja sama dalam suatu hubungan yang berpola.
4. *Psyhosocial system* adalah orang-orang yang berhubungan satu sama lain dalam kelompok kerja.

3. Konsep Manajemen

Manajemen menurut Paul Hersey dan Kenneth H.Blanchar (dalam siswanto,2013;2)sebagai salah satu usaha yang di lakukan dengan bersama individu atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen menurut Siswanto dan Doni (2014;16)manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya secara evektif dan evesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.Manajemen terdiri dari enam unsur (6M)yaitu: Men,Money,Methode,Material,Machine,dan Market.

Menurut Goerge R. Terry dan Leslie (dalam Karyoto,2016;3)manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang dilibat kan bimbingan atau pengarahan terhadap suatu kelompok orang kearah tujuan organisasi atau maksud – maksud nya yang nyata.Artinnya bimbingan perlu diberikan karena tidak semua pekerjan terampil dalam melaksanakan kegiatan organisasi.Cara yang digunakan untuk membimbing tentu bergantung kepada kebijakan dan kegiatan pimpinan,misalnya kepada pekerja yang kurang trampildapat diberi platihan untuk meningkatkan kemampuannya.

Selanjutnya menurut Malayu Hasibuan (2014;2)mengatakan manajemen adalah ilmu dan mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber- sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Didalam pengertian ini bahwa manajemen memiliki fungsi.Adapun fungsi tersebut kita kenal dengan POAC (*plennig,organizing,actuating,controlling*) dimana fungsi tersebut berkaitan dengan teori sistem yang meliputi input,proses,dan output.Sehingga suatu organisasi akan melakukan dengan perencanaan,pembagian tugas,pelaksaan dan pengawasan yang dimiliki ini akan menunjang dalam pencapaian tujuan efektiv dan efesien.

Menurut Donovan dan Jackson(dalam Pasolong,214;82)mendefinisikan manajemen sebagai proses yang dilakasanakan pada tingkat organisasi tertentu,sebagai rangkaian keterampilan dan sebagai serangkaian tugas.Dari batasan yang disebutkan oleh Donovan dan Jackson diatas di interpretasikan,bahwa manajemen dilaksanakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pada tingkat organisasi tertentu,dan merupakan serangkaian keterampilan dalam mengelola organisasi serta sebagai serangkaian tugas yang melekat pada diri menejer/pemimpin itu sendiri. Selanjutnya dari penjelasan diatas Siswanto (2005;2)memberikan batasan defenisi manajemen yaitu manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan ,perorganisasian,pengarahan,pemotivasian,dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

The Ling Gie(dalam Mulyono 2016;17) Manajemen sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengotrolan terhadap sumber daya manusia dan alam untuk mencapai tujuan yg telah di tetapkan.

Menurut A,F Stoner dan Charle Wankel (dalam Siswanto 2005;2) manajemen adalah proses perencanaan ,pengorganisasian,kepemimpinan,dan pengendalian upaya anggota organisasi dan pengguaan seluruh sumber daya organisasi lainya demi tercapainya tujuan organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi laianya demi tercapainnya tujuan organisasi .Menurut Stoner danWankel (dalam siswanto 2005;20 bahwaproses adalah cara sistematis untuk melanjutkan suatu pekerjaan.Dalam batasan manajemen diatas proses nya meliputi:

1. Perencanaan yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan
2. Pengorganisasian yaitu mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dibutuhkan.
3. Kepemimpinan yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin
4. Penngendalian yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan jika tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Paul Hersey dan Kenneth H.Blanchard manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dab bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi (dalam Siswanto 2005;2)

Manajemen sebagai fungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat.Sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena – fenomena (gejala – gejala)kejadian- kejadian,keadan – keadan,jadI memberikan penjelasan.

Menurut Nawawi (2008;41)beliau memilah –milah pengertian manajemen menjadi beberapa unsur diantaranya adalah:

1. Unsur tujuan organisasi,yang bila di kaitkan dengan pandangan baru adalah keuntungan dan juga manfaat lainya,melalui dihasilkannyaproduk dan pelayanan yang berkualitas.
2. Unsur bantuan, yang bila di hubungkan dengan pandangan baru berarti pengikut sertaan dalam melaksanakan pekerjan sebagai esksistensi organisasi melalui kerja individual dan kerja di dalam tim (team work)
3. Unsur orang lain,yang jika di kaitkan dengan pandangan baru,dapat diartikan para pekerja dan para menejer dan top menejer,namun jika para menejer dan top menejer dipandang sebagai kesatuan dan di sebut eksekutif,maka orang lain adalah para pekerja yang harus di perlakukan sebagai partner.

Kemudian Darwis dkk(2009;5)yang mengatakan manajemen lebih mengutamakan pendayaguanaan sumberdaya manusia lainnya,oleh karena itu manajemen sangat di perlukan dalam sebuah organisasi untuk mendayagunakan sumbr daya yang ada ,maka dengan demikian diperlukan suatu konsep manajemen sumber daya manusia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Donovan dan Jackson mendefinisikan manajemen sebagai proses yang dilakasanakan pada tingkat organisasi tertentu,(dalam Pasolong 2007;82)Sebagai rangkaian keterampilan(skil) dan sebagai serangkaian tugas.Setiap fungsi manajemen sangat di perlukan untuk mengatur manajemen pada setiap organisasi hingga tercapai tujuan akhir dari sebuah organisasi .Dari fungsi manajemen tersebut ,fungsi penilaian merupakan fungsi akhir mana jemen untuk menentukan berhasil atau tidak nya suatu pekerjaan.

Terry mengatakan secara esensial seorang menejer adalah orang ilmuan dan seniman .Ia memerlukan sesuatu pengetahuan yang dapat disusun menurut sistem yang memberikan kebenaran – kebenaran pokok yang dapat digunakan dalam mengoperasikan pekerjaannya (dalam Siswanto 2005;10)

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber –sumber lainnya secara efektiv dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu(dalam 2002;1-2)

Menurut Stoner berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan ,memimpin,dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan mengunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang sudah di tetap kan (dalam zulkifli 2005;28) Jadi dapat disimpulkan manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan,pengorganisasian, pengarahan,pemotivasian ,dan pengendalian terhadap oran dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

4. Konsep Pelaksanaan

Model implementasi/pelaksanaan kebijakan yang berperspektif top down yang diteoremakan oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

George C. Edward III dalam Agustino (2008:140) yang didalamnya terdapat empat variabel.

yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

a. Komunikasi;

b. Sumber Daya;

c. Disposisi;

d. Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas yaitu:

a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).
c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsistensi dan jelas untuk diterapkan.

2. Sumberdaya

Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan ataupun aturan aturan serta bagaimana akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya melakukan pekerjaan secara efektif,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maka implementasi kebijakan tidak efektif , sumber daya yang tersebut yakni disebutkan yaitu:

a. Sumber daya manusia, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia karena sekali pun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia yang terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian) pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif.
b. Sumber daya anggaran, dalam implementasi kebijakan, sumber daya yang memengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan perlatan yang diperlukan untuk membiayai operasionaisasi pelaksanaan kebijakan karena terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada public yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas
c. Sumber daya peralatan adalah sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan saranaa yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
d. Sumber daya informasi dan kewenangan, informasi mampu menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Serta kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempegaruhi efektifitas pelaksaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan menyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksnakan yang dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak bias. Dan juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan yang sedang di impelemtasikan Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah:

a. Pengangkatan birokrat

   Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga Insentif

b. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebjakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Salah satu dari apsek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standar Operating Prosedures* (SOP) dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman. (2002:70).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penujang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan,menurut George C. Edwards III adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.

b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.

c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

B. Kerangaka Pikir

Adapun yang menjadi kerangka pikir dari judul "Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang di Kota Pekanbaru (Studi kasus Jalan Harapan Raya No.185,Tangkerang Utara,Kota Pekanbaru) secara rinci dapat dilihat pada bagian bawah ini:

Gambar II.I : Kerangka Pikir Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Sumber : Modifikasi 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Hipotesis

Diduga Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik,Dikarenakan masih banyak terdapat Gelandang dan Pengemis di rambu lalu lintas tepatnya di lampu merah dijalan Harapan Raya No.185 Tangkerang Utara.

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan penganalisa dan tidak untuk mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep –konsep yang dipakai,konsep tersebut antara lain;

1) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan – keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.
2) Organisasi adalah sebagai setiap bentuk persekutuan atau lebih yang berkerja sama secara formal terkait dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan dalam ikatan dimana terdapat seseorang/beberapa yang disebut atasan dan seseorang disebut bawahan.
3) Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan,pengorganisasian, pengarahan,pemotivasian, dan pengadilan terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan'
4) Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.

5) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan di bidang social.

6) Gelandang adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara ditempat umum.

7) Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap bela kasihan orang lain.

E. Oprasional variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting guna menghindari penyimpangan atau kesalah pahaman pada saat pengumpulan data. Penyimpangan muncul pada bentuk biasa. Penyimpangan dapat disebab kan oleh pemilihan atau penggunaan instrument (alat pengumpulan data) yang kurang tepat atau susunan pertanyaan yang tiak konsisten. Definisi operasional variabel adalah suatu dimensi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasi kan kegiatan atau membenar kan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut , Sugiyono (2014).

Oprasional variabel penelitian ini yaitu tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Larangan Pengemis.Adapun penjabaran variabel- variabel proses strategi tersebut kedalam oprasional variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel II.I: Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Penilaian
1	**2**	3	4	5
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai	Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Larangan Pengemis	1. Komunikasi	a. Melakukan penyampaian informasi yang jelas tentang Peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang larangan pengemis di rambu lalu lintas	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Resouces (sumber daya)	a. Jumlah staf dan anggota yang bertugas untuk melaksanakan penertiban pengemis yang sudah diatur dalam peraturan daerah kota	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman. (2002:70).			pekanbaru nomor 12 tahun 2008. b. Memiliki kualitas mutu yang baik dalam menjalankan tugas c. Informasi yang jelas dan tepat dalam mengambil keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan di lapangan d. Fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan.	
		3.Disposisi	a. Sikap dan komitmen oleh petugas pelaksana	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		4. Struktur Birokrasi	a. SOP,((Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

F. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah dan menganalisa data, maka penelitian terhadap pelaksanaan variabel atau indikator dibagi tiga yaitu:Baik ,Cukup baik,dan Kurang baik.

Baik :Apabila rata-rata penelitian jawaban terhadap indikator dari Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan Harapan Raya No.185 Tangkerang Utara,Kota Pekanbaru) 75%-100%

Cukup baik : Apabila rata-rata penelitian jawaban terhadap indikator dari Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan Harapan Raya No.185 Tangkerang Utara,Kota Pekanbaru) 34%-74%

Kurang baik : Apabila rata-rata penelitian jawaban terhadap indikator dari Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan Harapan Raya No.185 Tangkerang Utara,Kota Pekanbaru) 0%-33%

Sedangkan untuk pengukuran variabel digunakan kategori sebagai berikut:

1. Komunikasi

Baik :Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 75%-100%

Cukup baik : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 34%-74%

Kurang baik : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 0%-33%

2. Sumber Daya (Resouces)

Baik :Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 75%-100%

Cukup baik : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 34%-74%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kurang baik : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 0%-33%

3. Disposisi

Baik :Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 75%-100%

Cukup baik : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 34%-74%

Kurang baik : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 0%-33%

4. Struktur Birokrasi

Baik :Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 75%-100%

Cukup baik : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 34%-74%

Kurang baik : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 0%-33%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A.Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *survey deskriptif*. Yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui saat pengamatan penulis dilapangan,dengan cara mengumpulkan data,mengklarifikasi dan menganalisis sehingga data yang diperoleh merupakan kebenaran.

Metode penelitian ini merupakan metode kuantitatif. Karena menurut Sugiyono (2012;8).Dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivme, dan di gunakan untuk meneliti populasi dan sempel tertentu,pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian ,analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Lokasi Penelitian

Jl.Parit Indah / Jl.Datuk Setia Maharaja No.6 Simpang Tiga,Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya ,Kota Pekanbaru. Menurut usman (2009;4)penetapan lokasi penelitian di maksudkan untuk membatasi daerah dari variabel –variabel yang di teliti .Dalam penelitian penulis memilih pada kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Populasi dan Sempel

Menurut Arikunto (2006;130) Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terdapat terdapat pada kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Tabel III.I Datar Populasi dan Sampel Analasisi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

No	Sup Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru	1	1	100%
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1	1	100%
3.	Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	1	1	100%
4.	Staf Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	50	25	50%
5.	Gelandang dan Pengemis	165	60	50%
Jumlah			108	

Sumber Data : Data olahan Penulis 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Teknik Penarikan Sempel

Teknik penarikan sempel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik sensus,Menurut Sugiyono (2015;53)sensus adalah teknik penentuan sampel bila pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu.

Sementara untuk masyarakat digunakan teknik accidental sampling, accidental sampling adalah teknik penentuan sempel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel,bila dipandang orang yang di temui itu cocok sebagai sumber data.(Sugiyono,2015;55).

a. Untuk Kepala Dinas Sosila dan Pemakaman Kota Pekanbaru digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
b. Untuk pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru (dalam menentukan jumlah pegawai yang akan dijadikan sampel). Dengan menggunakan rumus slovin, yaitu :

$$n = \frac{80}{1 + 80.5\%^2}$$

$$n = \frac{80}{1.5\%^2}$$

$$n = \frac{80}{1,5}$$

$$n = 31$$

Ket : n =Jumlah elemen/anggota sampel

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

N = Jumlah elemen/anggota populasi

e = error level (tingkat kesalahan) (catatan: umumnya digunakan 1% atau 0,01, 5% atau 0,05, dan 10% atau 0,1) (catatan dapat dipilih oleh peneliti)

c. Untuk Gelandang dan Pengemis di Kota Pekanbaru digunakan teknik accidental sampling, pemilihan sample secara kebetulan atau aksidental, merupakan pemilihan sampel dari siapa saja yang kebetulan ada atau di jumpai menurut keinginan peneliti yang sesuai dengan ada penelitian pada saat di lapangan.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Iskandar (2008;253)adalah data yang di peroleh dari hasil observansi dan wawancara kepada responden.Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara dan kuisoner dengan responden tentang pendapatnya yang berkaitan seputar Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan Harapan Raya No.185 Tangkerang Utara,Kota Pekanbaru).

2. Data Skunder

Menurut Iskandar (2008;253) adalah data yang di peroleh melalui penumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi penelaahnya terhadap dokumen pribadi.resmi kelembagaan ,referensi –referensi atau peraturan (tulisan dan lainya yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian).Data skunder berfungsi sebagai pelengkap atas data primer,seperti peraturan pemerintah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh penulis untuk menumpulkan data yang di butuhkan .Dalam penelitian ini penulis mengunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya Ridwan (2009;29). Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang di gunakan peeneliti untuk mendapatkan secara lisan melalui tanggung jawab langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti dengan mengajukan beberapa pertannyan.
2. Observasi adalah pengamatan dan pencacatan yang sistimatis terhadap gejala-gejala yang di teliti,Usman (2009;52) Pada observasi penulis melakukan pengamatan langsung dalam bentuk pra survey di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru serta pengamatan langsung di lampu merah Simpang 4 Jl Harapan Raya.
3. Dokumen ,yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan mengunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen .Baik foto rekaman dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpul data –data yang di perlukan penulis tersebut maka data-data akan diolah dengan melakukan pengelompokan- pengelompokan data yang sesuai dengan jenis –jenis data yang di peroleh . Diolah lalu di pelajari serta dilakukan analisis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menurut pemikiran penulis dengan membandingkan kenyataan di lapangan dan membandingkan dengan ketetapan seharusnya.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Berikut ini adalah jadwal waktu pelaksanaan penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan Harapan Raya No.185 Tangkerang Utara,Kota Pekanbaru).

Tabel III.II: Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

No	Jenis kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																								
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP																									
2	Seminar UP																									
3	Revisi UP																									
4	Revisi kuisoner																									
5	Rekomendasi survy																									
6	Survy lapangan																									

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7	Analisis data																									
8	Penyususnan laporan hasil penelitian(skripsi)																									
9	Konsultasi revisi skripsi																									
10	Ujian konfrehensi skripsi																									
11	Revisi skripsi																									
12	Pengadaan skripsi																									

Sumber:Modivikasi penulis,2021

I .Rencana Sistimatik Laporan Penelitian

Adapun sistimatika penelitian penulisan usulan penelitian dalam bentuk proposal ini di bahas dalam bab 6,dimana pembahasan –pembahasan bab mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainya yaitu:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah,dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah ,serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II :STUDI KEPUTUSAN DAN KERANGKA PIKIR

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bab ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan usulan penelitian lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini .Selanjutnya akan di uraikan kerangka pikiran,konsep oprasional hipotesis,konsep variabel penelitian dan teknik pengukuraan.

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari tipe penelitian,lokasi penelitian,populasi dan sempel,teknik penarikan sempel,jenis dan sumber data ,teknik pengumpulan data,teknik analisis data,jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikianKota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau. Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau dengan luas sekitas 622.26 km2 dan secara astronomis terletak diantara 0° 28'- 0° 48' Lintang Utara dan 102° 12 - 102° 32' Bujur Timur. Dengan batas-batas Wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- Di bagian Utara Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Di bagian Timur Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Di bagian Selatan Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar
- Sedangkan dibagian Barat Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 bahwa Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km2 menjadi ± 446,50 Km2 yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas Wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km2 dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi Kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara sungai siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yangsaat itu merupakan Kawasan yang maju dan sangat penting. Karna kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komodotif perdagangan baik dari luar untuk di angkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk di bawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minang Kabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para pengusaha pada jaman itu.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerjaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul jalil Amaludin Syah Menetap di Senapelan, beliau membangun istana di Kampung Bukit dan diperkirakan istana tersebut terletak disekitar lokasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang di rintis tersebut dilanjutkan oleh putra nya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser disekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut cacatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang di bantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampinggi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan : SK kerajaan Bershuit Van Inlandsch Zelfbestuur Van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.

1. Tahun 1932 Pekanbaru masuk Wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
2. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, District menjadi UGM yang di kepalai oleh Gunco.
3. Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
5. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
6. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
7. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Riau.
8. UU No. 8 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
9. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntunan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib Pemerintahan dan Pembinaan Wilayah yang cukup luas, maka di bentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda baru tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak Sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat Pedalaman ke Kota serta dari daerah lainnya.

Keadan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya, beriklim tropis dengan suhu udara maksimal berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat celcius.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar dimusim hujan jatuh pada bulan January s/d April dan September s/d Desember sementara itu untuk musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota pekanbaru. Seiring semakin banyak nya warga pendatang untuk menetap di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendapatan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik di sector kesehatan, sector Pendidikan, sector Ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Sebagian besar penduduk yang mendiami Wilayah Kota Pekanbaru adalah suku melayu, namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Minang, Jawa, Batak, dan sebagainya. Mata pencarian penduduk Kota Pekanbaru ialah Pegawai Pemerintah, Pegawai Swasta serta Pedagang. Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas Kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, dan Kecamatan Rumbai Pesisir di Kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Di Kota Pekanbaru		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	146.960	138.972	285.932
2.	Payung Sekaki	46.476	44.426	90.902
3.	Bukit Raya	53.757	49.965	103.722
4.	Marpoyan Damai	68.104	63.258	131.362
5.	Tenayan Raya	83.837	78.693	162.530
6.	Limapuluh	21.138	21.331	42.469
7.	Sail	10.994	11.021	22.015
8.	Pekanbaru Kota	13.032	12.687	25.719
9.	Sukajadi	24.115	24.429	48.544
10.	Senapelan	18.590	18.869	37.459
11.	Rumbai	35.370	32.200	67.570
12.	Rumbai Pesisir	37.544	35.320	72.864
Total		559.917	531.171	1.091.088

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2018

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 sebanyak 1.091.088 yang terdiri dari 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, dan berikut ini jumlah data penduduk menurut kelompok umur yang ada di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur Berdasarkan Kecamatan Di Kota Pekanbaru tahun 2018

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Umur Berdasarkan Kecamatan Di Kota Pekanbaru		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	57.467	52.551	110.018
5-9	50.281	46.149	96.430
10-14	45.936	42.572	88.513
15-19	51.290	52.497	103.787
20-24	62.368	61.252	123.620
25-29	53.560	50.689	104.249
30-34	47.116	45.895	93.001
35-39	44.801	43.317	88.118
40-44	41.152	38.297	79.449
45-49	34.885	30.560	65.445
50-54	26.061	23.175	49.239
55-59	18.971	17.780	36.751
60-64	11.895	10.464	22.359
65+	14.134	15.968	30.102
Total	559.917	531.171	1.091.088

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2018

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk yang paling banyak terdapat pada umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 123.620 jiwa dan jumlah penduduk yang paling banyak berikutnya terdapat pada umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 110.018 jiwa dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada umur 60-64 tahun yaitu sebanyak 22.359 jiwa pada tahun 2018.

1. Pemerintah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Walikota yang di angkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda Pemerintahan Kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Walikota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru terdiri dari unsur Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Walikota dan masing masing kepala seksi yaitu seksi Pemerintahan, seksi Ketentraman dan Ketertiban, seksi Pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas Kecamatan, lima puluh delapan kelurahan serta enam ratus delapan puluh RW dan dua ribu delapan ratus lima puluh empat RT yang ada di Kota Pekanbaru, adapun nama Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya, dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari empat Kelurahan yaitu Kelurahan Labuh Baru Timur, Kelurahan Tampan, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Labuh Baru Barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat Kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kelurahan Tangkerang Utara, dan Kelurahan Tangkerang Labuai. Kecamatan Marpoyan Damai yang terdiri dari lima Kelurahan yaitu Kelurahan Tangkerang Tengah, Kelurahan Tangkerang Barat, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Sidomulyo Timur dan Kelurahan Wonorejo. Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat Kelurahan yaitu Kelurahan Kulim, Kelurahan Tangkerang Timur, Kelurahan Rejosari, dan Kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang memiliki tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Cita Raya, Kelurahan Suka Maju dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kelurahan Suka Mulia. Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Tengah, Kelurahan Kampung melayu, Kelurahan Kendung Sari, Kelurahan Harjosari, Kelurahan Sukajadi, dan Kelurahan Pulau Karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari lima Kelurahan yaitu Kelurahan Lembun Sari, Kelurahan Muara Fajar, Kelurahan Rumbai Bukit, Kelurahan Palas, dan Kelurahan Sri Meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat Kelurahan yaitu Kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, Kelurahan Tanjung Rhu, dan Kelurahan Pesisir.

Kecamatan Pekanbaru Kota terdiri dari enam Kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Sumahilang, Kelurahan Tanah Datar, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Suka Ramai dan Kelurahan Kota Tinggi. Kecamatan Rumbai Pesisir yang terdiri dari enam Kelurahan yaitu Kelurahan Meranti Pendek, Kelurahan Limbungan, Kelurahan Lembah Sari, Kelurahan Limbungan Baru, dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura.

B. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan. Dengan ingin menjajah kembali Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia. Pejuang Indonesia sedikitpun tidak bergeming dengan gertakan Belanda, malah kembali menggertak belanda dengan semboyan merdeka atau mati.

Ketika terjadi pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan telah terjadi peristiwa yang sangat heroic, dimana pejuang Indonesia rela mati demi mempertahankan kemerdekaan republic Indonesia yang telah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diproklamirkannya, sementara penjajah belanda yang selama ini telah mendapat keuntungan dan kenyataan yang melimpah dari bumi Indonesia tidak rela melepas begitu saja, maka terjadilah pertempuran yang luar biasa dahsyat, peristiwa itu terjadi antara tahun 1947-1950. Didalam pertempuran besar ini banyak terjadi kekacauan,sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Selain itu untuk menyokong gerakan pejuang yang berada di garis depan diperlukan bantuan yang continue untuk menyuplai logistic pertempuran dan pemakaman agar jangan sampai terputus. Rakyat yang mengungsi berada digaris belakang tentara pejuang yang memerlukan bantuan dan pertolongan juga, maka diperlukan tenda-tenda untuk menampung pengungsi, pejuang yang terluka dan penampungan bahan bantuan yang dating entah dari mana saja. Pekerjaan besar ini jika tidak diatur sedemikian rupa maka akan menimbulkan kebingungan dan saling tumpah tindih pekerjaan. Oleh pejuang yang berada digaris belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistic dan pekerjaan lain yang dibutuhkan saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai hari kesetiakawan social yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. Hingga kini Pemerintah Negara Republik Indonesia setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) atau hari jadi Departemen Sosial.

Pada tahun 1948 Pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai kedaerah-daerah yang tugas pokonya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adalah membantu Tentara Republik Indonesia dalam peperangan. Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya adalah membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat, Tenaga kerja Indonesia dan Organisasi Sosial.

Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat Provinsi disebut Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seorang Kepala Departemen, sementara untuk tingkat Kabupaten/ Kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/ Kota, untuk tingkat Kecamatan disebut petugas Sosial Kecamatan yang berkantor di kantor Camat setempat. Tugas utama dari Departemen Sosial adalah Perintis Pejuang Kemerdekaan, Mengangkat Pahlawan Nasional, Penyandang Cacat, Karang Taruna, Panti Asuhan, Fakir Miskin, Korban Bencana, Lembaga Sosial, Organisasi Sosial, Korban tindak kekerasan dalam Rumah Tangga, Korban perdagangan anak, Gelandangan dan Pengemis, Pekerja Seks Komersial (PSK), Korban HIV/ AIDS, Korban Napza, Komunitas Adat Terpencil.

Pada tahun 1998, Departemen Sosial Pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu di jabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Nomor 07 tahun 2001.

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah No. 08 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang (Kabid), 9 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilate belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru.

Kewenangan yang luas dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah unuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2004 dibuatkanlah 6 (Enam) tempat Pemakaman umum yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru.

2. **Visi dan Misi**

a. Visi

Sebagaimana telah dirumuskan bersama, bahwa visi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

"***Terwujud Kesejahteraan Sosial bagi PMKS/PSKS dilandasi kesetiakawanan social serta pemakaman yang indah dan tertib***"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja.
2. Meningkatkan dan memberdayakan PMKS/PSKS agar tumbuh dan berkembang dalam system masyarakat
3. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja PMKS/PSKS
4. Meningkatkan pelayanan social kepada masyarakat secara optimal melalui Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM)
5. Menciptakan lapangan kerja melalui kerja sama dengan dunia usaha

3. **Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.**

1. Dinas Sosial dan Pemakaman Terdiri dari :
   a. Kepala Dinas.
   b. Sekretariat
   c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
   d. Bidang Rehabilitas Sosial
   e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
   f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
   g. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

a. Tugas Pokok Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 8 Tahun 2008 tentang pembentukan Susuna Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dinas Sosial dan Pemakaman

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mempunyai tugas pokok “Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Sosial dan Pemakaman”.

b. Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman

1. Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman mempunyai rincian tugas :

a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang social dan pemakaman.

b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang social dan pemakaman

c. Membina dan melaksanakan urusan bidang social dan pemakaman.

d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang social dan pemakaman

e. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

f. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimanadimaksud juga menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang social dan pemakaman.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum.

c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.

d. Pembinaan dan pelaporan.

e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

2. Sekretariat mempunyai rincian tugas :

a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan program dinas.

b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan dinas.

d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat.

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian.

f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.

g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.

h. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas.

i. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban, ketertiban dan keamanan kantor

j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.

k. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.

l. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis.

m. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.

n. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasakan informasi, data , laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sekretariat dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dinas.
b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga.
c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas.
d. Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan.
e. Pengkoordinasian laporan tahunan.
f. Pengkoordinasian kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor.
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

3. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan mempunyai rincian tugas:

a. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
b. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan.
c. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum/tata usaha dan perlengkapan.
d. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum, dan perlengkapan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai.

f. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor.

g. Melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas.

h. Melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas.

i. Merumuskan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas, urusan dalam, akomodasi dan perjalanan dinas.

j. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materil bagi unit kerja di lingkungan dinas.

k. Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.

l. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.

m. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Buku induk pegawai, menyusun DUK dan registrasi PNS di lingkungan dinas.

n. Merumuskan dan melakukan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan DP3 PNS.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

o. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai.

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Kepegawaian Umum dan Perlengkapan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggrakan fungsi :

a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.

b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.

c. Pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.

d. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

4. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai rincian tugas:

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan social dibidang kesejahteraan anak, keluarga, lanjut usia dan jompo, bimbingan keluarga miskin, pemberdayaan lembaga-lembaga social termasuk pengawasan terhadap panti social, penyuluhan social serta jaminan social

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan social dan pemberdayaan social

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) dan potensi serta sumber-sumber kesejahteraan social (PSKS) dibidang tugasnya.

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan social dan pengembangan swadaya masyarakat dibidang kesejahteraan social

e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerja sama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai bidang tugasnya.

f. Mengkoordinasikan, membina, menyusun laporan dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya.

g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja'.

b. Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan social dan pemberdayaan social.

c. Pengkoordinasian inventaris data penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS).

d. Pengumpulan bahan kegiatan penyuluhan.

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

5. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai rincian tugas :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan social, pemberdayaan bagi penyandang cacat, anak terlantar/anak nakal, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna susila
b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerja sama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
c. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
f. Mengkoordinasikan, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang.
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja.
b. Pembinaan lanjut, pelayanan social.
c. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

6. Bidang Bantuan Sosial mempunyai rincian tugas :

a. Mengkooordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bantuan social, advokasi social dan perlindungan social

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan social terhadap korban bencana alam, kerusuhan massa, dan tindak kekerasan.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bantuan Sosial dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program bantuan social, advokasi social dan perlindungan social.

b. Pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan social.

c. Pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan social kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.

d. Pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana bantuan social.

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

7. Bidang Pemakaman mempunyai rincian tugas :

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penggunaan pemakaman dalam rangka penguatan retribusi.

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penggunaan pemakaman dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemakaman.

c. Mengkoordinasikan dan merumuskan pemeliharaan dan penertiban taman pemakaman milik pemerintah, swasta dan masyarakat serta mengawasi pengelolaannya dalam rangka menunjang kebersihan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana,pengadaan lahan pemakaman, penataan pemakaman dan pembuatan peta lokasi pemakaman serta peta penggunaan tanah pemakaman.

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemakaman dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penggunaan pemakaman.

b. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penggunaan pemakaman.

c. Pemeliharaan dan penertiban taman pemakaman.

d. Pengadaan lahan pemakaman, penataan pemakaman dan pembuatan peta lokasi pemakaman serta peta penggunaan tanah pemakaman.

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

C. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur mengandung unsur-unsur Spesialisasi kerja, Standarisasi, Koordinasi dalam setiap melaksanakan pekerjaaan dan pembuatan keputusan.

Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian organisasi dalam arti bagan atau struktur. Menurut Siagian (2003;96) Organisasi dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ditinjau dari dua sudut pandang, Pertama, organisasi dapat dipandang sebagai "wadah"dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan.

Struktur organisasi akan dipengaruhi oleh kondisi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian tugas. Adapun struktu organisasi pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru merupakan struktur organisasi berbentuk fungsional, pada struktur organisasi tersebut menunjukkan adanya garis-garis kekuasaan dan tanggung jawab tidak langsung. Setiap atasan tidak mempunyai sejumlah bawahan yang bertugas untuk menerima perintah dan tugas dari setiap orang yang setingkat lebih tinggi dari kedudukannya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 8 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah:

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman terdiri dari:

a. Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman
b. Sekretaris membawahi :
    - Sub Bagian Kepegawaian, umum dan perlengkapan
    - Sub Bagian Keuangan.
    - Sub Bagian Penyusunan Program.
c. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial, membawahi:
    - Seksi Kesejahteraan anak, Keluarga dan Lansia.
    - Seksi Pemberayaan Keluarga Miskin.
    - Seksi Lembaga dan Penyuluhan Sosial.
d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
    - Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Eks Korban Nafsa dan Hukuman

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.
- Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.

e. Bidang Bantuan Sosial, membawahi :

- Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana.
- Seksi HAM, Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan.
- Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Pengumpulan Dana Sosial

f. Bidang Pemakaman, membawahi :

- Seksi Registrasi, Penyiapan Lahan dan Perlengkapan
- Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Pemakaman.
- Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemakaman

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar IV.I : Struktur Organisasi di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian ini yang sangat berperan penting adalah responden, karena dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru , jadi data-data yang di dapat dalam penelitian ini bersumber dari pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru dan Gelandang dan Pengemis di Kota Pekanbaru. Penulis mendapatkan informasi melalui penyebaran kuesioner yaitu pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berjumlah 25 orang,Gelandang dan Pengemis berjumlah 60 orang. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia dan pendidikan. Identitas responden ini diperlukan untuk mempermudah penulis dalam mengolah data yang disajikan dalam bentuk table. Selain itu penulis juga menilai bahwa pentingnya untuk mengetahui usia dan pendidikan responden, karena hal ini akan dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap penelitian tersebut. Berikut ini merupakan paparan lebih jelas menganai identitas respondend dalam penelitian ini:

1. Identitas Respondend Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian tentang Analisis Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, dan dengan cara penyebaran kuesioner maka identitas responden adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 : Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Staf Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang

No	Identitas Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	15	60%
2	Perempuan	10	40%
	Jumlah	25	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2021

Dari table V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden pegawai yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah dominanya adalah Laki-Laki yang berjumlah 15 orang dengan persentase 60% sedangkan untuk pegawai yang berjenis kelamin Perempuan berjumlah 10 orang dengan persentase 40% dan total keseluruhan pegawai Staf Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.

Tabel V.2 : Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Gelandang dan Pengemis

No	Identitas Responden	Jumlah	Persentase %

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	**Laki-Laki**	**35**	**58%**
2	**Perempuan**	**25**	**42%**
	Jumlah	**60**	**100%**

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2021

Dari table V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden Gelandang dan Pengemis yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah dominanya adalah Laki-Laki yang berjumlah 35 orang dengan persentase 58%, sedangakan untuk Gelandang dan Pengemis yang berjenis kelamin Perempuan berjumlah 25 orang dengan persentase 42%. Mengapa responden Gelandang dan Pengemis lebih banyak, di karenakan peneliti terun dilapangan.

2. Identitas Respondend Berdasarkan Usia

Identitas kedua yang penulis peroleh dari hasil lapangan adalah identitas respondend mengenai usia. Usia merupakan salah satu penentu dalam pelaksanaan penelitian ini, karena semakin matang usia seseorang maka cara berpikirnya tentu sudah berbeda dengan seseorang yang belum memiliki usia yang matang. Dari hasil penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan usia dapat dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.3 : Identitas Responden Menurut Usia Staf Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.

No	Identitas Responden	Jumlah	Persentase%
1	20-30 Tahun	16	64%
2	31-40 Tahun	7	28%
3	41-50 Tahun	2	8%
4	>50 Tahun	0	0
	Jumlah	25	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2021

Dari tabel V.3 diatas dinyatakan bahwa responden dari Staf Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang, responden yang paling banyak memiliki usia 20-30 tahun yaitu sebanyak 16 orang dengan persetase 64%, dan jumlah yang memiliki usia 31-40 tahun sebanyak 7 orang dengan persentase 28% dan terakhir yang memilki usia 41-50 tahun sebanyak 2 orang dengan persetase 8 %, jadi total keseluruhan dari jumlah Staf Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang berdasarkan usia yang dijadikan sampel adalah sebanyak 25 orang.

Tabel V.4 : Identitas Responden Menurut Usia Gelandang dan Pengemis

No	Identitas Responden	Jumlah	Persentase%
1	20-30 Tahun	24	40%
2	31-40 Tahun	21	35%
3	41-50 Tahun	9	15%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4	**>50 Tahun**	**6**	**10%**
	Jumlah	**60**	**100%**

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2021

Dari tabel V.4 diatas dinyatakan bahwa responden dari Gelandang dan Pengemis, responden yang paling banyak memiliki usia 20-30 tahun yaitu sebanyak 24 orang dengan persentase 40%, dan jumlah yang memiliki usia 31-40 tahun sebanyak 21 orang dengan persentase 35% dan yang memilki usia 41-50 tahun sebanyak 9 orang dengan persentase 15 %, dan yang terakhir memiliki usia diatas 50 tahun sebanyak 6 orang dengan persentase 10%. Jadi total keseluruhan Gelandang dan Pengemis berjumlah 60 orang.

3. Identitas Respondend Berdasarkan Pendidikan

Dan identitas ketiga yang penulis dapatkan dari hasil di lapangan berdasarkan pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi cara sudut pandang seseorang, baik itu dalam memberikan pendapat maupun dalam melakukan suatu tindakan. Dari hasil penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, serta dengan penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan menurut jenjang pendidikan adalah tabel berikut ini:

Tabel V.5 : Identitas Respondend Menurut Jenjang Pendidikan Staf Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang

No.	Identitas Respondend	Jumlah	Presentase %
1.	**SD**	**0**	**0**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.	**SMP**	**0**	**0**
3.	**SMA/SMK**	**10**	**40%**
4.	**Diploma III**	**4**	**16%**
5.	**Sarjana S1**	**11**	**44%**
	Jumlah	**25**	**100%**

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2021

Dari tabel V.5 diatas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Staf Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian dominan nya adalah tamatan S1 sebanyak 11 orang dengan persentase 44% sedangkan untuk tamatan Diploma I/II/III sebanyak 4 orang dengan persentase 16% dan yang terakhir tamatan SMA sebanyak 10 orang dengan jumlah persentasi 40%. Jadi, total keseluruhan Staf Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang yang dijadikan sampel sebanyak 25 orang.

Tabel V.6 : Identitas Respondend Menurut Jenjang Pendidikan Gelandang dan Pengemis

No.	Identitas Respondend	Jumlah	Presentase %
1.	**SD**	**12**	**20%**
2.	**SMP**	**25**	**42%**
3.	**SMA/SMK**	**23**	**38%**
	Jumlah	**60**	**100%**

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2021

Dari tabel V.6 diatas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Gelandang dan Pengemis yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian dominan nya adalah tamatan SMP sebanyak 25 orang dengan jumlah persentasi 42%.Tamatan SD berjumlah 12 orang dengan persentasi 20%. Dan Tamatan SMA berjumlah 23 orang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan persentasi 38%. Jadi, total keseluruhan Gelandang dan Pengemis yang dijadikan sampel sebanyak 60 orang.

B. Hasil dan Pembahasan Dari Indikator Variabel Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus diberikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi (dalam Harbani Pasolong 2013). Ada beberapa indikator yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Nurdin Usman (2002 : 70), dan indikator-indikator yang penulis gunakan dalam mencari hasil penelitian ini adalah: Komunikasi, Resouces (Sumber Daya), Disposisi, Struktur Birokrasi. Dan didalam setiap indikator akan dilengkapi dengan sub indicator yang berguna untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator maka penulis akan membahas tentang Komunikasi dalam bentuk tabel.

1. Komunikasi

. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

Didalam indikator ini ada 1 item penilaian yang dilakukan yaitu, Melakukan penyampaian informasi yang jelas tentang Peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang larangan pengemis di rambu lalu lintas.

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Staf Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis.

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Ada	Jarang	Tidak Ada	
1.	Melakukan penyampaian informasi yang jelas tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang larangan pengemis di rambu lalu lintas.	25 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	25 (100%)
Jumlah		25	0	0	25
Rata-rata		25	0	0	25
Persentase		100%	0%	0%	100%

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.7 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh pegawai adalah 100% "Baik", dari tanggapan diatas dapat dilihat bahwa untuk penilian dalam indikator Komunikasi bahwa Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah melakukan 100% baik kegiatan ataupun program serta memberikan pelatih untuk dapat membantu berjalannya kegiatan ataupun program yang dilaksanakan.

Tabel V.8: Tanggapan Responden Gelandang dan Pengemis Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis.

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Ada	Jarang	Tidak Ada	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1.	Melakukan penyampaian informasi yang jelas tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang larangan pengemis di rambu lalu lintas.	27 (45%)	30 (50%)	3 (5%)	60 (100%)
Jumlah		27	30	3	60
Rata-rata		27	30	3	60
Persentase		45%	50%	5%	100%

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.8 diatas,Gelandang dan Pengemis yang memeberikan tanggapan dominan berada pada kategori "Cukup Baik" rata-rata sebanyak 30 orang dengan persentase 50%. Hal ini terjadi dikarenakan ada Gelandang dan Pengemis yang tidak mengetahui tentang kegiatan atau peraturan daerah nomor 12 tahun 2008,dan pengemis beralasan persaingan pekerjaan di kota pekanbaru sangat tinngi dan susah sehingga dari mengemis inilah mata pencaharian pengemis, Yang menjawab dengan kategori "Cukup Baik" rata-rata 27 orang dengan persentase 45% dan kategori "Kurang Baik" rata-rata 3 orang dengan persentase 5%.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, , dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jawaban yang telah didapatkan. Wawancara yang penulis lakukan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dengan Bapak Drs. Mahyuddin sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan Bapak Agustian, AP, M.Si selaku Seksi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang, adapun hasil wawancara yang penulis dapat dari seksi tersebut adalah sebagai berikut :

> "Komunikasi yang sudah kami laksanakan berupa informasi yang mana bahwasanya terkait tentang peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban social dalam penanganan gelandang dan pengemis sudah kami sampaikan kepada gelandang dan pengemis,akan tetapi masih banyak nya terutama pengemis yang tidak mengindahkan informasi tentang peraturan daearah ini, alasan dari pengemis kenapa tidak mengindahkan himbauan kami ini dikarenakan mereka tidak ada mata pencaharaian yang lain dan juga banyaknya masyarakat memiliki rasa iba terhadap pengemis sehingga masyarakat banyak memberi sumbangan".

Berdasarkan observasi dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang telah adanya Komunikasi ataupun program yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengatasi masalah penanganan gelandang dan penegmis di kota Pekanbaru. Dimana kegiatan ataupun program ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan gelandang, pengemis yang masih melakukan aksi meminta minta di rambu lalu lintas di kota Pekanbaru. Selanjutnya, penulis akan menyajikan indicator kedua yaitu Resouces (Sumber Daya), adapun hasil yang penulis dapatkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

2. Resouces (Sumber Daya)

Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. . Dimana pada indikator ini dapat kita lihat apakah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah melaksanakan serta mensosialisasikan atau memfasilitasi program-program ataupun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegiatan yang dapat mengatasi masalah ketertiban social dalam penanganan gelandang dan pengemis ada di Kota Pekanbaru.

Didalam indikator ini ada 4 item penilaian yang dilakukan yaitu, Pertama, apakah sudah cukup Jumlah staf dan anggota yang bertugas. Kedua, melihat apakah sudah memadai kualitas dan mutu dari staf dan anggota dalaam menjalankan tugasnya tersebut. Ketiga, apakah sudah ada mendapatkan informasi yang jelas dan mengambil keputusan dilapangan yang bisa dipertanggung jawabkan, Keempat yaitu apakah sudah memadai fasilitas yang digunakan dalam melaksanakan tugas.

Tabel V.9: Tanggapan Responden Staf Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis.

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Ada	Jarang	Tidak Ada	
1.	Jumlah staf dan anggota yang bertugas untuk melaksanakan penertiban pengemis yang sudah diatur dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008.	25 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	25 (100%)
2.	Memiliki kualitas mutu yang baik dalam menjalankan tugas	20 (80%)	5 (20%)	0 (0%)	25 (100%)
3.	Informasi yang jelas dan tepat dalam mengambil keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan di lapangan.	25 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	25 (100%)
4.	Fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan.	25 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	25 (100%)
Jumlah		95	5	0	100

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rata-rata	24	1	0	25
Persentase	96%	4%	0%	100%

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel V.9, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh pegawai pada kategori "Baik" rata-rata sebanyak 24 orang dengan persentase 96%, untuk kategori "Kurang Baik" rata-rata sebanyak 1 orang dengan persentase 4%, sedangkan untuk kategori " Kurang Baik" rata-rata sebanyak 0 orang dengan persentase 0%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa tanggapan ataupun penilaian dominan yang diberikan oleh pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berada pada kategori "Baik", hal ini dikarenakan bahwa pihak pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah, melaksanakan program atau resouces (sumber daya) terhadap gelandang dan pengemis, berkomunikasi yang baik antara sesama Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dengan Gelandang dan Pengemis.

Tabel V.10 : Tanggapan Responden Gelandang dan Pengemis Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis.

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Ada	Jarang	Tidak Ada	
1.	Jumlah staf dan anggota yang bertugas untuk melaksanakan penertiban pengemis yang sudah diatur dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008.	11 (18%)	29 (48%)	20 (34%)	60 (100%)
2.	Memiliki kualitas mutu yang baik dalam menjalankan tugas.	6 (10%)	13 (22%)	41 (68%)	60 (100%)
3.	Informasi yang jelas dan tepat dalam mengambil keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan di lapangan.	14 (23%)	19 (32%)	27 (45%)	60 (100%)
4.	Fasilitas yang digunakan	15	18	27	60

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	dalam pelaksanaan.	(25%)	(30%)	(45%)	(100%)
Jumlah		46	79	115	240
Rata-rata		11	20	29	60
Persentase		18%	33%	49%	100%

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel V.10, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Gelandang dan Pengemis pada kategori "Cukup Baik" rata-rata sebanyak 29 orang dengan persentase 49%, untuk kategori "Cukup Baik" dengan rata-rata 20 orang dengan persentase 33%, sedangkan untuk kategori "Cukup Baik" juga rata-rata sebanyak 11 orang dengan persentase 18%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa tanggapan ataupun penilaian dominan yang diberikan oleh Gelandang dan Pengemis berada pada kategori "Cukup Baik".

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Disabilitas oleh Ibuk Sulhana Lely, Am. Keb , dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jawaban yang telah didapatkan. Adapun hasil wawancara yang penulis dapat dari Kepala Seksi Disabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

"Kami sudah melaksanakan tugas yang sudah sesuai dengan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban social dalam penanganan gelandang dan pengemis.Disini sebagaimana yang disebut Resouces (Sumber Daya) dalam keanggotaan sudah kami bagi beberapa tim untuk melaksanakan kegiatan patrol dan razia diseluruh kota pekanbaru ini, akan tetapi disini kami memiliki kendala yaitu berupa sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas untuk melaksanakan patrol sudah termasuk tua (usang),dan juga kekurangan alat keselamatan dilapangan seperti rompi yang mana pada saat ini Gelandang dan Pengemis ada beberapa oknum yang membawa senjata tajam,itu berlokasi di rambu lalu lintas simpang 4 jl.Nangka Ujung,disana banyak pengemis yang membawa senjata tajam dan kadang mobil patroli kami dilempari batu saat kami melaksanakan tugas".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan observasi dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang telah adanya Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis. Dimana pelaksanaan ataupun kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Gelandang dan Pengemis sudah mengerti dari peraturan daearah nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban social dalam penanganan gelandang dan pengemis, akan tetapi belum ada efek jera dan kesadaran dari peraturan tersebut.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak bias. Di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah melaksanakan disposisi tersebut dengan melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008. Dan juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan yang sedang di impelemtasikan Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah:

c. Pengangkatan birokrat

   Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga Insentif

d. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Didalam indikator ini ada 1 item penilaian yang dilakukan yaitu, Sikap dan komitmen oleh petugas pelaksana.

Tabel V.11 : Tanggapan Responden Staf Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis.

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Ada	Jarang	Tidak Ada	
1.	Sikap dan komitmen oleh petugas pelaksana	25 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	25 (100%)
Jumlah		25	0	0	25
Rata-rata		25	0	0	25
Persentase		100%	0%	0%	100%

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.11 diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai dominan memberikan tanggapan dengan kategori "Baik" rata-rata sebanyak 25 orang dengan persentase 100%. Dalam hal ini, pihak pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah melakukan sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan peraturan daearah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 sebagai implementer peraturan ini.

Tabel V.12 : Tanggapan Responden Gelandang dan Pengemis Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis.

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Ada	Jarang	Tidak Ada	
1.	Sikap dan komitmen oleh petugas pelaksana	12 (20%)	18 (30%)	30 (50%)	60 (100%)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jumlah	12	18	30	60
Rata-rata	12	18	30	60
Persentase	20%	30%	50%	100%

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan table V.12 diatas dapat dijelaskan bahwa Gelandang dan Pengemis dominan memberikan tanggapan dengan kategori "Cukup Baik" rata-rata sebanyak 30 orang dengan persentase 50%. Sedangkan unuk kategori "Cukup Efektif" rata-rata sebanyak 18 orang dengan persentase 30% dan kategori "Cukup Efektif" juga rata-rata sebanyak 12 orang dengan persentase 20%. Dalam hal ini, bahwasan Gelandang dan Pengemis memberikan tanggapan bahwa Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru masih ternilai cukup efektif dalam melaksanakan peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban social dalam penanganan gelandang dan pengemis sebagai implementer peraturan tersebut.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Disabilitas oleh Ibuk Sulhana Lely, Am. Keb, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jawaban yang telah didapatkan. Wawancara yang penulis lakukan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

> "Kami juga sudah komitmen dalam menjalankan tugas ini, karena kami sudah bagian dari implementor dalam melaksanakan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008. Didalam melaksanakan tugas ini kami sudah melakukan kerja sama dengan Satpot PP kota pekanbaru dalam menjalankan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008. Adapun kegiatan rutinitas kami dalam penanganan gelandang dan pengemis yaitu melakukan razia dan patroli dalam sehari bisa 2 kali patrol. Dalam 2 kali patrol kami sudah menangkap gelandang dan pengemis dan dibawa ke kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Disana kami sudah mendata gelandang dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengemis. Bagi Gelandang dan Pengemis yang baru pertama kali tertangkap sama kami, akan kami berikan dana untuk gelandang dan pengemis agar bisa mereka kembali kekampung halaman mereka, dan bagi yang sudah tertangkap lebih dari satu kali akan kami bina di Yayasan bina social yang ada di kota pekanbaru. ”

Berdasarkan observasi dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang telah adanya Pelaksanaan ataupun program dari peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban social dalam penanganan gelandang dan pengemis yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengatasi masalah ketertiban social dalam penanganan gelandang dan pengemis. Dimana kegiatan ataupun program ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebjakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Struktur Birokrasi juga bisa disebut, SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku

Didalam indikator ini ada 1 item penilaian yang dilakukan yaitu, SOP,((Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.

. **Tabel V.13 : : Tanggapan Responden Staf Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis.

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Ada	Jarang	Tidak Ada	
1.	SOP,((Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.	25 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	25 (100%)
Jumlah		25	0	0	25
Rata-rata		25	0	0	25
Persentase		100%	0%	0%	100%

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan table V.13 diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai dominan memberikan tanggapan dengan kategori "Baik" rata-rata sebanyak 25 orang dengan persentase 100%. Dalam hal ini, pihak pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah melakukan tugas berdasarkan dengan SOP (Standar Operating Procedures) yang sudah diatur dalam Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Tabel V.14 : Tanggapan Responden Gelandang dan Pengemis Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis.

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Ada	Jarang	Tidak Ada	
1.	SOP,((Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.	6 (10%)	15 (25%)	39 (65%)	60 (100%)
Jumlah		6	15	39	60
Rata-rata		6	15	39	60
Persentase		10%	25%	65%	100%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan table V.14 diatas dapat dijelaskan bahwa Gelandang dan Pengemis dominan memberikan tanggapan dengan kategori "Cukup Baik" rata-rata sebanyak 39 orang dengan persentase 65%. Sedangkan unuk kategori "Cukup Efektif" rata-rata sebanyak 15 orang dengan persentase 25% dan kategori "Cukup Efektif" juga rata-rata sebanyak 6 orang dengan persentase 10%. Dalam hal ini, bahwasan Gelandang dan Pengemis memberikan tanggapan bahwa Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru masih ternilai cukup efektif dalam melaksanakan peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban social dalam penanganan gelandang dan pengemis dengan SOP dalam Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Disabilitas oleh Ibuk Sulhana Lely, Am. Keb, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jawaban yang telah didapatkan. Wawancara yang penulis lakukan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

"Kami sudah menjalankan SOP dalam menangani peningkatan gelandang dan pengemis di kota pekanbaru dalam menggelar razia dan patroli,dengan menjadikan SOP sebagai pedoman kerja bagi setiap pekerja dengan mengikuti peraturan dalam SOP kami. Penilaian kami kepada anggota dilapangan sudah mengikuti SOP yang berlaku,dan juga yang jelas sebagaimana dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 ketika melaksanakan Razia kami melakukan kepada Gelandang dan Pengemis dengan membawa mereka yang terjaring ke kantor kami dan mendata mereka. Dan juga dari segi sarana pra sarana seperti, rompi, kendaraan masih dibilang kurang mecukupi, dan kami sudah mealaporkan kekurangan-kekurangan yang kami butuhkan kepada pemerintah kota pekanbaru."

Berdasarkan observasi dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang telah adanya Pelaksanaan ataupun program dari peraturan daerah kota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban social dalam penanganan gelandang dan pengemis yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengatasi masalah ketertiban social dalam penanganan gelandang dan pengemis. Penulis menyimpulkan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru memiliki SOP (Standar Operating Procedures) yang berlaku dan wajib para pekerja atau anggota mengikuti SOP yang berlaku.

Tabel V.15 : Rekapitulasi Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Ada	Jarang	Tidak Ada	
1.	Komunikasi	52 (61%)	30 (35%)	3 (4%)	85 (100%)
2.	Resouces (Sumber Daya)	35 (41%)	21 (25%)	29 (34%)	85 (100%)
3.	Disposisi	37 (44%)	18 (21%)	30 (35%)	85 (100%)
4.	Struktur Birokrasi	31 (36%)	15 (18%)	39 (46%)	85 (100%)
Jumlah		155	84	101	340
Rata-rata		39	21	25	85
Persentase		46%	25%	29%	100%

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan table V.15 Rekapitulasi hasil penelitian Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penanganan Gelandang dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang mendapatkan rata-rata dalam kategori "Baik "dengan Jumlah 155 orang dengan persentasi 46% , sedangkan yang mendapatkan kategori "Cukup Baik"dengan jumlah 84 orang dengan persentasi 25%, dan yang mendapatkan kategori "Kurang Baik" dengan jumlah 101 dengan persentasi 29%. Jadi dapat diambil kesimpulan hasil rekapitulasi keseluruhan indicator berada di kategori "Cukup Baik".

C. Faktor-Faktor Penghambat Yang Dialami Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menjalankan Ketertiban Social penanganan Gelandang dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Berdasarkan kegiatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis, di saat menjalankan kegiatan atau peraturan yang sudah ditetapkan, adapun factor-faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai berikut :

1) Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 terdapat pada Bab XII di pasal 29 ayat (1) berbunyi "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)." Dan ayat (2) berbunyi "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran. Dalam penjelasan pasal diatas bahwa landasan hukum untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam penanganan Gelandang dan Pengemis tidak lah kuat, yang mana dalam pasal 29 ayat (1) dan (2) dijelaskan jika Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melakukan kegiatan menangani gelandang dan pengemis dalam memberi efek jera tidak lah efektif,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Karena Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah melakukan pembinaan yang sudah diatur juga dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 terdapat pada Bab X pasal 23 ayat (1) ada 3 poin dalam memberikan pembinaan terhadap gelandang dan pengemis yaitu :

a) Teguran Lisan
b) Teguran Tertulis
c) Pencabutan izin operasional Organisasi Sosial dan Panti Sosial (Yayasan pembinaan yang diatasi oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru).

Berdasarkan pembinaan diatas sampai saat ini belum ada efek penurunan angka gelandang dan pengemis di kota pekanbaru. Karena gelandang dan pengemis sudah merasa nyaman dalam berprofesi seperti itu,ditambah dengan masyarakat masih banyak yang memberikan sumbangan kepada gelandang dan pengemis, dan juga landasan hukum untuk gelandang dan pengemis juga kurang kuat, akan tetapi landasan hukuman untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam memberikan pembinaan sangat terbatas.

2) Sarana dan Prasana yang mana Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya sangat minimum, seperti mobil patroli sudah tua, rompi pelindung badan. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sangat butuh rompi pelindung badan disaat menjalankan atau melaksanakan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 dilapangan, dikarenakan banyak gelandang dan pengemis saat ini membawa senjata tajam. Disaat melakukan patroli gelandang dan pengemis merasa keberatan saat dirazia. Mereka menolak untuk dibawa dan dibina ke kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru. Dan terjadilah perlawanan terhadap Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru saat dilapangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilaksanakan peneliti mengenai Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang menggunakan 4 indikator Komunikasi, Resouces (Sumber Daya), Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Maka peneliti mengambil kesimpulan dan saran untuk bahan acuan dari hasil penelitian yang sekiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca skripsi ini terutama untuk masukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

A. Kesimpulan

Untuk indikator Komunikasi dengan item penilaian menyusun program-program atau pun kegiatan yang dilakukan, melakukan penyampaian informasi yang jelas tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang larangan pengemis di rambu lalu lintas. Maka diperoleh hasil tanggapan dari responden Staf Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial,Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang pada kategori “Baik”. Sedangkan hasil dari responden dari Gelandang dan Pengemis pada kategori “Cukup Baik”. Jika keseluruhan hasil rekapitulasi tanggapan kedua kelompok tersebut digabungkan berada pada kategori “Cukup Baik”.

1. Untuk indikator Resouces (Sumber Daya) dengan item penilaian Jumlah staf dan anggota yang bertugas untuk melaksanakan penertiban pengemis yang sudah diatur dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008, Memiliki kualitas mutu yang baik dalam menjalankan tugas, Informasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang jelas dan tepat dalam mengambil keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan di lapangan, Fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan. Hasil tanggapan responden Staf Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang pada kategori "Baik". Sedangkan hasil responden dari Gelandang dan Pengemis pada kategori "Cukup Baik". Jika hasil rekapitulasi tanggapan kedua kelompok responden ini digabungkan berada pada kategori "Cukup Baik".

2. Untuk indikator Disposisi dengan item penilian hasil dari sikap dan komitmen oleh petugas pelaksana. Maka diperoleh hasil tanggapan dari responden Staf Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang pada kategori "Baik". Sedangkan hasil dari responden Gelandang dan Pengemis pada kategori "Cukup Baik". Jika keseluruhan hasil rekapitulasi tanggapan kedua kelompok tersebut digabungkan berada pada kategori "Cukup Baik".
3. Untuk indikator Struktur Birokrasi dengan item penilian SOP,((Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Maka diperoleh hasil tanggapan dari responden Staf Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang pada kategori "Baik". Sedangkan hasil dari responden Gelandang dan Pengemis pada kategori "Cukup Baik". Jika keseluruhan hasil rekapitulasi tanggapan kedua kelompok tersebut digabungkan berada pada kategori "Cukup Baik".

Dari kesimpulan dari keempat indicator diatas, bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban social dalam menangani gelandang dan pengemis bisa tercapai dengan efektif apabila

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam usaha rehabilitasi social diharapkan adanya balai PMKS di provinis, penegakan peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban social, dan juga dukungan dan kerja sama antara semua pihak dan masyarakat agar tidak memberikan sumbangan dijalan dalam bentuk apapun. Dan juga harus ada perhatian dari pemerintah kota pekanbaru kepada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk membantu apa saja kendala yang dialami oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menjalankan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban social dalam penanganan gelandang dan pengemis.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang ingin peneliti buat dari keseluruhan hasil yang telah didapatkan:

1) Untuk terlaksana atau tercapainya hasil efektif dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban social dalam penanganan gelandang dan pengemis harus diperbarui peraturan daerah kota pekanbaru tersebut. Agar adanya penegakan hukum yang kuat, jelas, dan adil untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menjalankan razia dan patroli untuk menekan turunnya angka gelandang dan pengemis di kota pekanbaru.
2) Pemerintah Kota Pekanbaru harus melakukan diskusi bersama Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk membahas hal-hal yang menjadi kekurangan dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban social dalam penanganan gelandang dan pengemis, dan juga membahas anggaran dana untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang sebagai impelementor dari peraturan daerah kota pekanbaru agar sarana dan prasana juga dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3) Dan untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru agar bisa memberikan masukan kepada pemerintah kota pekanbaru untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwasanya untuk memberikan sumbangan bisa diberikan kepada yayasan social, panti asuhan, dan organisasi social lainnya. Karena jika masyarakat memberikan sumbangan kepada gelandang dan pengemis, terutama memberikan sumbangan ke gelandang dan pengemis di tempat umum, seperti di rambu lalu lintas, jalan raya, jalur hijau, akan membuat si gelandang dan pengemis menjadi betah dalam menjalankan profesinya sebagai gelandang dan pengemis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara. Kajian Konsep, Teori dan Fakta Dalam Menciptakan Good Governance*. Bandung. CV Pustaka Setia.

Dunn, W.N. 2007. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Yokyakarta. PT. Hanandita Graha Widya.

Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta, Erlangga.

Pasolong, Harbani, 2014. *Teori Administrasi Publik.* Bandung: Alfabeta

Syafie, Inu Kencana (2006). *Ilmu Administrasi Publik.* Jakarta: Rineka Cipta

Siagian, P.Sondang, 2003. *Filsafat Administrasi,* Jakarta: Bumi Aksara

Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi,* Jakarta: PT. Prenhallindo

Wibowo. 2007. *Manajemen kinerja.* PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Prawirosntono, Suryadi. 2008. *Kebijakan Kinerja Karyawan.* Yogyakarta

Kumorotomo, Wahyu. 2007. *Etika Administrasi Negara.* Jakarta: PT Raja Grafindo

Yussa, Tarmizi, Andry, Hendry. 2015. *Perilaku Etika Administrasi Publik*. Marpoyan Tujuh, Pekanbaru

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* CV. Bandung: Alfabeta.

Syafri, W. (2012). *Studi tentang administrasi publik.* Erlangga Tangkilisan, (2005). *Manajemen Publik.* Jakarta: Gramedia

Zulkifli & Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen.* Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

Mahmudi . 2005. *Manajemen kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Wibisono, Dermawan. 2006. *Manajemen Kinerja: Konsep, Desain dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan.* Jakarta: Erlangga.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik.* Jakarta: Erlangga.

Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia : Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

Zukifli, Dkk, 2013. *Buku Pedoman Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa.* Pekanbaru. Fisipol UIR.

Uha, nawawi, ismail, 2015. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*,Jakarta, Prenada media group.

Hasibuan, malayu, 2010.*Organisasi Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia dan Motivasi*. Jakarta. Bumi Aksara.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis.

Undang–Undang Nomor 8 tahun 1974 PP 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Undang-Undang Nomor 32 Tentang pemerintah Daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
الجامعة الإسلامية الريوية
Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 3649/A_UIR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Kevin Kamarullah
Npm : 167110372
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Persentase Plagiasi : 25 % (87 Halaman)

Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 September 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PEKANBARU

Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :